

ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM KINERJA KEUANGAN KPKNL YOGYAKARTA PERIODE 2021-2024

Amanda Intan Pratiwi¹, Evi Grediani^{2*}, Budhi Purwantoro Jati³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Politeknik YKPN Yogyakarta¹²³

email: amandaintannnp@gmail.com¹, evigrediani@aaykpn.ac.id^{2*},

budhi_pjati@aaykpn.ac.id³

ABSTRACT

The necessity for public sector financial management that prioritises both budget realisation and benefits realised is the problem that underlies this study. The purpose of this study is to use the Value for Money concept which takes into account economy, efficiency, and effectiveness to examine KPKNL Yogyakarta's financial performance from 2021 to 2024. The study uses secondary data from LAKIN and KPKNL Yogyakarta's financial reports in a quantitative descriptive manner. The findings indicate that, at 90-99%, the economic ratio satisfies economic criteria. With an average of less than 60%, the efficiency ratio is categorised as very efficient. With an average range of 80-89%, the effectiveness ratio is classified as sufficiently effective. All things considered, KPKNL Yogyakarta performs well, economically, and efficiently.

Keywords: *Economics; Effectiveness; Efficiency; Financial Performance; Value for Money*

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah semakin kompleks seiring dengan penerapan kebijakan fiskal yang ketat dan pergeseran prioritas pembangunan nasional. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi penting seperti penerapan akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Kementerian Keuangan RI, 2020). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui akuntabilitas, instansi pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, serta capaian kerjanya kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun hasil pelaksanaan program yang telah dicapai (Sari & Hidayat, 2025). Namun, masih ditemukan inefisiensi penggunaan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi kinerja yang cenderung berfokus pada penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan (Ibrahim *et al.*, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam mengukur dan menilai kinerja fiskal pemerintah.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen yang sangat penting bagi instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Melalui proses pengukuran kinerja yang sistematis dan terstruktur, instansi pemerintah dapat menilai tingkat pencapaian program dan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, serta indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pengukuran tersebut juga berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, pengukuran kinerja membantu memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya telah dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya menjadi alat pengendalian internal, tetapi juga sarana transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik (Hanum *et al.*, 2021). Kinerja pemerintah merupakan indikator pencapaian yang mencerminkan sejauh mana pemerintah, terutama pemerintah daerah, mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung

jawabnya secara optimal sesuai dengan tujuan, sasaran, serta kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya (Pangaribuan & Situmorang, 2024). Tingkat kinerja tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program, efektivitas pelayanan publik, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya dan anggaran secara tepat guna. Dengan demikian, kinerja pemerintah menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menilai sejauh mana penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah konsep *Value for Money*, yang menilai kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang hemat biaya, menghasilkan output optimal, serta mencapai tujuan secara efektif. Dengan penerapan *Value for Money*, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi publik. Oleh karena itu, penerapan konsep *Value for Money* menjadi krusial dalam menilai kinerja keuangan instansi pemerintah, termasuk dalam konteks Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

Besarnya jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk KPKNL Yogyakarta perlu menerapkan prinsip disiplin fiskal dalam setiap pelaksanaan programnya. Hal ini penting agar setiap dana yang dikeluarkan dapat digunakan secara tepat sasaran, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi secara maksimal. Disiplin fiskal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap batas pengeluaran, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan melakukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, KPKNL Yogyakarta dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mendukung tercapainya target strategis tanpa terjadi pemborosan maupun penyimpangan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, 2024).

Kinerja keuangan merupakan aspek penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah atau instansi publik dalam mengelola anggaran, mengendalikan belanja, serta menjaga keberlanjutan arus kas guna mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kinerja keuangan dapat dilihat dari sejauh mana realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta bagaimana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik juga menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kinerja keuangan yang optimal berperan dalam memastikan stabilitas fiskal serta keberlangsungan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kinerja keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan sektor publik (Mukti & Priyawan, 2025).

Menurut Mahsun (2015:157) yang dikutip dalam (Wahiji *et al.*, 2022), pengukuran kinerja merupakan kegiatan sistematis untuk menilai pencapaian proyek terhadap sasaran yang ditetapkan, meliputi empat aspek: efisiensi sumber daya, standar mutu, dan kepuasan konsumen, perbandingan hasil dengan tujuan awal, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Robertso (2002) dalam Yuliyanto *et al.* (2023) juga menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan proses untuk mengukur perkembangan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari penilaian tersebut mencakup tingkat efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa, capaian hasil kegiatan yang berkaitan dengan sasaran, serta keberhasilan berbagai tindakan dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks sektor publik, pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi

juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang optimal.

Kinerja keuangan dapat dinilai melalui proses analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang disusun secara periodik. Informasi mengenai posisi keuangan serta capaian kinerja pada periode sebelumnya menjadi dasar yang penting dalam menilai kondisi aktual dan memproyeksikan kinerja keuangan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Data tersebut memiliki peranan krusial bagi para pemangku kepentingan karena berhubungan langsung dengan kebijakan pembayaran dividen, pemberian kompensasi, penilaian nilai sekuritas, perubahan harga, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang akan datang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002:4) dikutip dalam (Pulungan *et al.*, 2023). Dalam pengukuran kinerja, terdapat dua jenis informasi yang digunakan, yaitu informasi finansial dan informasi non finansial.

Menurut Kementerian Keuangan RI (2025) *Value for Money* berperan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja. *Value for Money* digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja sektor publik. Konsep ini bertujuan memberikan informasi terkait apakah pengeluaran anggaran mampu menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. Indikator yang dimaksud mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas.

Value for Money dapat diukur melalui berbagai rasio, sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo *et al.*, (2022), yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berfokus pada hubungan antara biaya barang dan biaya jasa yang digunakan. Efisiensi mengukur seberapa efektif suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas menurut pendapat Mardiasmo (2009:134) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tidak mempertimbangkan besaran biaya.

Menurut Sembiring, *et al.*, (2025) ekonomi merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya memperoleh input dengan kualitas yang sesuai pada biaya serendah mungkin, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa yang tetap memenuhi spesifikasi tanpa menimbulkan pemborosan. Dalam manajemen keuangan sektor publik, ekonomi menjadi tahap awal yang bertujuan untuk menghindari penggunaan sumber daya secara tidak efisien. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output, di mana organisasi dituntut untuk menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang minimal, yang diukur melalui tingkat produktivitas dan optimalisasi sumber daya. Sementara itu, efektivitas menitikberatkan pada tingkat pencapaian tujuan organisasi, dengan menilai kesesuaian antara hasil yang diperoleh dan rencana yang telah ditetapkan serta dampak positif program terhadap masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis kinerja instansi pemerintah menggunakan konsep *Value for Money*. Hidayat (2021) menemukan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau tergolong ekonomis namun belum efisien dan efektif. Khalis (2023) menunjukkan bahwa Bappeda Kota Medan memiliki kinerja yang kurang ekonomis dan tidak efisien, meskipun cukup efektif. Sementara itu, Hardiansyah (2024) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman cukup ekonomis dengan pengelolaan anggaran yang efisien, namun masih perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengawasan agar lebih efektif serta mendukung tercapainya good governance.

METODE PENELITIAN

Bagi Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan data. Data kuantitatif merujuk pada informasi yang disajikan dalam bentuk angka atau nilai numerik (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder, menurut (Abdullah *et al.*, 2022) data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain, seperti organisasi, instansi pemerintah, lembaga, maupun sumber lain yang mudah diakses, yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan oleh

penulis. Dalam penelitian ini, sumber data tersebut mencakup LAKIN Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk periode 2021-2024, serta Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk periode yang sama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, literatur, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi menurut Sugiyono (2013) berfokus pada pengumpulan data dari arsip, dokumen, dan bahan tertulis lainnya untuk mendukung analisis. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersumber dari arsip, dokumen resmi, serta berbagai bahan tertulis lainnya sebagai dasar dalam mendukung proses analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Yogyakarta periode 2021–2024 yang menjadi landasan dalam menilai kinerja keuangan dan capaian organisasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan pengukuran *Value for Money* melalui berbagai rasio, yaitu: (1) rasio ekonomis, dengan kriteria ekonomis kinerja keuangan dapat dikatakan sangat ekonomis apabila persentase kinerja keuangan lebih dari 100%, ekonomis apabila berada pada kisaran 90-99%, cukup ekonomis apabila berada pada kisaran 80-89%, kurang ekonomis apabila berada pada kisaran 60-79%, dan tidak ekonomis apabila persentase kinerja keuangan kurang dari 60%; (2) rasio efisiensi, dengan kriteria efisiensi kinerja keuangan dapat dikatakan tidak efisien apabila persentase kinerja keuangan lebih dari 100%, kurang efisien apabila berada pada kisaran 90-99%, cukup efisien apabila berada pada kisaran 80-89%, efisien apabila berada pada kisaran 60-79%, dan sangat efisien apabila persentase kinerja keuangan kurang dari 60%; dan (3) rasio efektivitas, dengan kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase kinerja keuangan lebih dari 100%, efektif apabila berada pada kisaran 90-99%, cukup efektif apabila berada pada kisaran 80-89%, kurang efektif apabila berada pada kisaran 60-79%, dan tidak efektif apabila persentase kinerja keuangan kurang dari 60% (Purnamasari *et al.*, 2014). Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio-rasio tersebut.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Ekonomis

Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2021-2024 dari segi ekonomis:

Tabel 1. Rasio Ekonomis KPKNL Yogyakarta Tahun 2021-2024

Tahun	Target Anggaran belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis
2021	2.711.286.000	2.559.456.332	94,40%
2022	1.450.428.000	1.357.832.839	93,62%

Tahun	Target Anggaran belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis
2023	2.074.260.000	1.668.919.896	80,46%
2024	2.570.895.000	2.365.351.026	92,00%

Sumber : Laporan Keuangan KPKNL Yogyakarta

Pada tahun 2021, rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di KPKNL Yogyakarta mencapai 94,40%, yang termasuk dalam kategori ekonomis. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.559.456.332,00 dari total anggaran Rp2.711.286.000,00. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan instansi dalam mengelola anggaran secara efisien, hemat, dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik juga mendukung kelancaran pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di KPKNL Yogyakarta sebesar 93,62%, yang termasuk dalam kategori ekonomis. Realisasi belanja mencapai Rp1.357.832.839,00 dari total anggaran sebesar Rp1.450.428.000,00, menunjukkan bahwa penggunaan biaya lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan kemampuan KPKNL Yogyakarta dalam mengelola anggaran secara efisien, ekonomis, dan produktif, sehingga sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pengelolaan anggaran yang tepat ini turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja instansi.

Pada tahun 2023, rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di KPKNL Yogyakarta sebesar 80,46%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis. Realisasi belanja KPKNL Yogyakarta tercatat sebesar Rp1.668.919.896,00 dari total anggaran Rp2.074.260.000,00, yang berarti pemanfaatan dana masih berada di bawah batas anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cermat dan terkontrol, sehingga setiap rupiah dapat digunakan secara tepat dan bermanfaat. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan instansi dalam mencapai efisiensi dan produktivitas, sekaligus memastikan pelaksanaan program tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

Pada tahun 2024, rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di KPKNL Yogyakarta sebesar 92,00%, yang termasuk dalam kategori ekonomis. Realisasi belanja KPKNL Yogyakarta tercatat sebesar Rp2.365.351.026,00 dari total anggaran Rp2.570.895.000,00, menunjukkan bahwa pemanfaatan dana masih berada di bawah batas anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan kemampuan instansi dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan cermat sehingga setiap pengeluaran dapat digunakan secara optimal. Pengelolaan anggaran yang hemat ini juga mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, di mana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program dan layanan publik. Selain itu, pendekatan yang produktif ini memastikan bahwa pencapaian target kinerja tetap tercapai tanpa menimbulkan pemborosan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan instansi.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis, dapat disimpulkan bahwa selama periode empat tahun (2021–2024), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta umumnya berada pada kriteria ekonomis, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan sehingga masuk dalam kriteria cukup ekonomis. Rasio ekonomis pada tahun 2021 tercatat sebesar 94,40% dan sedikit menurun menjadi 93,62% pada tahun 2022. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 13,16% menjadi 80,46%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 11,54% menjadi 92,00%. Rata-rata rasio ekonomis selama empat tahun tersebut mencapai 90,12%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang cermat, hati-hati, dan mampu menghindari pemborosan. Pencapaian ini mencerminkan

kemampuan KPKNL Yogyakarta dalam memanfaatkan anggaran secara efisien dan hemat, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja instansi secara optimal. Rasio ekonomis yang tinggi menegaskan bahwa instansi mampu merencanakan dan mengelola pengeluaran dengan penuh kehati-hatian, sehingga setiap sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan publik dan program pemerintah.

Rasio Efisiensi

Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2021-2024 dari segi efisiensi:

Tabel 2. Rasio Efisiensi KPKNL Yogyakarta Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2021	2.559.456.332	6.072.707.543	42,15%
2022	1.357.832.839	4.959.490.685	27,38%
2023	1.668.919.896	10.688.558.940	15,61%
2024	2.365.351.026	6.844.437.092	34,56%

Sumber : Laporan Keuangan KPKNL Yogyakarta

Pada tahun 2021, KPKNL Yogyakarta mencapai rasio efisiensi sebesar 42,15%, yang termasuk dalam kategori sangat efisien dalam pengelolaan anggaran. Realisasi belanja KPKNL Yogyakarta sebesar Rp2.559.456.332,00 mencakup pengeluaran untuk belanja modal maupun belanja barang, sedangkan pendapatan yang diterima mencapai Rp6.072.707.543,00 yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi mampu mengelola anggaran dengan cermat, memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal, dan menghindari pemborosan. Pemanfaatan anggaran yang efektif tersebut tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan operasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi serta produktivitas instansi. Selain itu, capaian ini mencerminkan kemampuan KPKNL Yogyakarta dalam menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan, sehingga kinerja keuangan instansi tetap sehat dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, instansi juga dapat memberikan pelayanan publik secara lebih maksimal dan meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Pada tahun 2022, KPKNL Yogyakarta mencatat rasio efisiensi sebesar 27,38%, yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Realisasi belanja KPKNL Yogyakarta sebesar Rp1.357.832.839,00 digunakan khusus untuk belanja barang, sedangkan pendapatan yang diterima mencapai Rp4.959.490.685,00 dari penerimaan negara bukan pajak. Hal ini menunjukkan kemampuan instansi dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara tepat, sehingga setiap dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung kegiatan operasional. Pengelolaan anggaran yang efisien ini juga mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang hemat dan produktif, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program. Selain itu, pencapaian tersebut menegaskan bahwa KPKNL Yogyakarta mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan, sehingga kinerja keuangan instansi tetap stabil dan mendukung pencapaian target organisasi. Dengan strategi pengelolaan keuangan yang baik, instansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pada tahun 2023, KPKNL Yogyakarta mencatat rasio efisiensi sebesar 15,61%, yang tergolong sangat efisien. Realisasi belanja KPKNL Yogyakarta sebesar Rp1.668.919.896,00 mencakup pengeluaran untuk belanja barang maupun belanja modal, sementara pendapatan yang diterima mencapai Rp10.688.558.940,00 dari penerimaan negara bukan pajak. Kondisi ini menggambarkan kemampuan instansi dalam memanfaatkan anggaran secara optimal, dengan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. Penggunaan dana yang terencana dengan baik tidak

hanya mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan operasional, tetapi juga memastikan pencapaian target kinerja keuangan instansi tetap terjaga. Selain itu, manajemen anggaran yang cermat ini menunjukkan adanya pengendalian internal yang baik dan strategi pemanfaatan sumber daya yang produktif, sehingga setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas instansi. Dengan pendekatan pengelolaan keuangan yang profesional, KPKNL Yogyakarta juga mampu meningkatkan akuntabilitas serta kualitas layanan publik secara berkesinambungan.

Pada tahun 2024, KPKNL Yogyakarta mencapai rasio efisiensi sebesar 34,56%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran dilakukan dengan sangat efisien. Realisasi belanja KPKNL Yogyakarta tercatat sebesar Rp2.365.351.026,00, yang mencakup belanja barang maupun belanja modal, sedangkan pendapatan yang diterima mencapai Rp6.844.437.092,00 dari penerimaan negara bukan pajak. Capaian ini menunjukkan kemampuan instansi dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan baik, sehingga setiap dana dapat digunakan secara tepat dan bermanfaat. Pengelolaan anggaran yang optimal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Selain itu, kondisi ini menegaskan bahwa KPKNL Yogyakarta mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga kinerja keuangan instansi tetap stabil dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan yang profesional, instansi juga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tergolong sangat efisien, ditandai dengan rasio efisiensi yang berada di bawah 60%. Tingkat efisiensi yang tinggi ini menunjukkan bahwa instansi mampu mengelola anggaran belanja secara cermat, sehingga tidak melebihi realisasi pendapatan yang diterima. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, setiap kegiatan operasional dapat dijalankan dengan penggunaan sumber daya dan pengeluaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Efisiensi ini juga mencerminkan kemampuan KPKNL Yogyakarta dalam memaksimalkan produktivitas anggaran untuk mendukung kelancaran program dan pencapaian target kinerja instansi. Lebih jauh, pengelolaan keuangan yang efisien meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Rasio Efektivitas

Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2021-2024 dari segi efektivitas:

Tabel 3. Rasio Efektivitas KPKNL Yogyakarta tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas
2021	6.072.707.543	12.338.510.000	49,22%
2022	4.959.490.685	9.053.628.000	54,78%
2023	10.688.558.940	8.340.100.000	128,16%
2024	6.844.437.092	5.581.158.000	122,63%

Sumber : Laporan Keuangan KPKNL Yogyakarta

Pada tahun 2021, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran di KPKNL Yogyakarta sebesar 49,22%, yang tergolong tidak efektif. Realisasi pendapatan KPKNL Yogyakarta tercatat sebesar Rp6.072.707.543,00, masih lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp12.338.510.000,00, yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan capaian aktual, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang digunakan untuk mencapai pendapatan. Evaluasi

ini penting agar instansi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target, baik dari sisi pengelolaan administrasi, mekanisme penerimaan, maupun perencanaan anggaran. Dengan penyesuaian strategi yang tepat, diharapkan kinerja keuangan ke depan dapat lebih efektif dan optimal, sehingga pendapatan yang diterima dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program, pencapaian target organisasi, serta pelayanan publik yang lebih maksimal. Selain itu, evaluasi juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan keuangan instansi.

Pada tahun 2022, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran di KPKNL Yogyakarta sebesar 54,78%, yang tergolong tidak efektif. Realisasi pendapatan KPKNL Yogyakarta sebesar Rp4.959.490.685,00 masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu Rp9.053.628.000,00, yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Perbedaan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan pendapatan agar target yang direncanakan dapat tercapai lebih konsisten. Untuk itu, KPKNL Yogyakarta perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan mekanisme pencapaian pendapatan, termasuk perencanaan anggaran, prosedur penerimaan, dan pengawasan internal. Dengan penerapan strategi yang lebih tepat dan terukur, diharapkan kinerja keuangan instansi dapat meningkat, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan setiap program yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Evaluasi ini juga akan memperkuat akuntabilitas instansi dalam memanfaatkan dana publik bagi pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran di KPKNL Yogyakarta mencapai 128,16%, yang tergolong sangat efektif. Realisasi pendapatan KPKNL Yogyakarta mencapai Rp10.688.558.940,00, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp8.340.100.000,00, yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan instansi dalam memaksimalkan potensi penerimaan secara optimal, sehingga setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan efektif. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan, tetapi juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang tepat, efisien, dan terencana dengan baik. Selain itu, pencapaian pendapatan di atas target menjadi indikator positif bagi kualitas perencanaan dan pengendalian internal instansi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan KPKNL Yogyakarta. Dengan strategi pengelolaan pendapatan yang efektif, instansi dapat memastikan kelancaran program dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran di KPKNL Yogyakarta mencapai 122,63%, yang tergolong sangat efektif. Realisasi pendapatan KPKNL Yogyakarta tercatat sebesar Rp6.844.437.092,00, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp5.581.158.000,00, yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Capaian ini mencerminkan kemampuan instansi dalam memanfaatkan seluruh potensi penerimaan secara optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan terencana dengan baik, sehingga setiap sumber daya keuangan digunakan secara maksimal. Pencapaian di atas target menunjukkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan strategi internal instansi yang kuat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas terhadap publik. Untuk mempertahankan kinerja yang positif ini, KPKNL Yogyakarta perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi strategi pengelolaan pendapatan agar capaian serupa dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio efektivitas, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta menunjukkan perkembangan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio efektivitas berada di bawah 60%, masing-masing sebesar 49,22% dan 54,78%, sehingga tergolong dalam kriteria tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target dan

output kegiatan pada periode tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas meningkat secara drastis, masing-masing mencapai 128,16% dan 122,63%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan kemampuan instansi dalam merencanakan dan melaksanakan program secara lebih optimal, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan pencapaian hasil kerja yang berdampak positif terhadap pelayanan publik. Tingkat efektivitas yang semakin tinggi juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan kegiatan dan anggaran yang diterapkan berhasil, sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan semakin membaik dan target institusi dapat dicapai dengan lebih optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode *Value for Money* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk tahun anggaran 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio ekonomis rata-rata berkisar antara 90% hingga 99%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta tergolong ekonomis, karena pengeluaran yang dilakukan relatif minimal namun tetap mendukung pencapaian tujuan dan kelancaran pelaksanaan program. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara cermat, hemat, dan produktif, sesuai dengan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan pengelolaan yang ekonomis, instansi mampu memaksimalkan manfaat setiap dana yang tersedia, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berjalan lancar tetapi juga memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi instansi dalam penggunaan dana publik, serta menjadi dasar bagi evaluasi dan perencanaan keuangan yang lebih efektif di tahun-tahun berikutnya. Pencapaian rasio ekonomis yang tinggi juga mencerminkan bahwa KPKNL Yogyakarta mampu menghindari pemborosan, menjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan, serta mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan dengan lebih terukur dan profesional.

Selanjutnya, analisis tingkat rasio efisiensi menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio berada di bawah 60% selama periode 2021–2024. Hasil ini menandakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta tergolong sangat efisien, karena instansi mampu memaksimalkan hasil atau output dengan penggunaan sumber daya atau input yang seminimal mungkin. Capaian ini mencerminkan kemampuan KPKNL Yogyakarta dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara optimal, sehingga setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas dan program instansi. Pengelolaan anggaran yang efisien juga menunjukkan bahwa instansi mampu menghindari pemborosan, menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan, serta meningkatkan produktivitas kegiatan. Selain itu, efisiensi yang tinggi memperkuat akuntabilitas dan transparansi instansi, sekaligus menjadi indikator bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara profesional dan mendukung pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Sementara itu, tingkat rasio efektivitas KPKNL Yogyakarta menunjukkan hasil yang bervariasi selama periode penelitian 2021–2024. Pada tahun 2021 dan 2022, rata-rata rasio efektivitas berada di bawah 60%, yang menandakan bahwa kinerja instansi pada periode tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pencapaian target serta pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan kegiatan perlu disesuaikan agar output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas meningkat secara signifikan menjadi di atas 100%, yang menandakan bahwa pelaksanaan program dan pencapaian tujuan instansi telah berjalan sangat efektif. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan yang nyata dalam pengelolaan anggaran,

optimalisasi penggunaan sumber daya, dan perbaikan strategi operasional, sehingga kinerja kelembagaan secara keseluruhan meningkat dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa KPKNL Yogyakarta mampu menyesuaikan diri dan memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program instansi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengukuran kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada KPKNL Yogyakarta, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi maupun peneliti selanjutnya. Pertama, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta disarankan untuk terus meningkatkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tidak hanya pada kegiatan operasional rutin, tetapi juga pada program-program strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, setiap seksi atau unit di KPKNL Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarunit serta melakukan perencanaan anggaran secara lebih matang dan terstruktur, sehingga pelaksanaan belanja dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan sesuai prioritas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran dan capaian kinerja perlu dilakukan secara rutin agar instansi dapat menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan dan program sesuai dengan kondisi yang berkembang, sehingga efektivitas dan produktivitas organisasi dapat terus meningkat. Dengan penerapan langkah-langkah ini, KPKNL Yogyakarta tidak hanya mampu mempertahankan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Aiman, U., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Hanum, Z., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja kampus Islam swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi*, 1, 811-816.
- Hardiansyah, T. (2024). Analisis *Value for Money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Sleman periode 2018-2021 [Skripsi, Universitas Cendekia Mitra Indonesia Yogyakarta].
- Hidayat, M. T. (2021). *Analisis Value for Money pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau* [Skripsi, Universitas Islam Riau].
- Ibrahim, L., Abdi, M. N., & Elyang. (2020). Analisis perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul-Sel tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(1), 23-49. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i1.3046>
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. (2021). *Laporan keuangan tahunan audited tahun anggaran 2021 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021*. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. (2022). *Laporan keuangan tahunan audited tahun anggaran 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022*. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. (2023). *Laporan keuangan tahunan audited tahun anggaran 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023*. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. (2024). *Laporan keuangan tahunan audited tahun anggaran 2024 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024*. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Khalis, A. N. (2023). *Analisis Value for Money pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan].
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mukti, C. F., & Priyawan, S. (2025). Pengaruh Green Process Innovation, Green Product Innovation Dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Akuntansi Manajemen Lingkungan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 144-155. Doi:<https://doi.org/10.54367/Jrak.V11i2>
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1-19. Doi:<https://doi.org/10.54367/Jrak.V10i1.3519>
- Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2022). Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep *Value For Money* pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumpang Kota Surakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 21-27.
- Pulungan, M. A. A. G., Octalin, I. S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Pada Kinerja Keuangan PT.Telkon Indonesia Tbk (Periode 2020-2022). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 247-261. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.835>
- Purnamasari, I. D. M. I., & Cipta, W. (2014). Analisis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten berdasarkan *Value for Money* audit atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007-2011. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2(1).
- Sari, O. S., & Hidayat, M. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 49-59. Doi:<https://doi.org/10.54367/Jrak.V11i1>
- Sembiring, Y. B., Tarigan, W. B., Parhusip, P., Padang, N. N., & Lumbangaol, R. (2025). Realisasi Belanja Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Dinas Sosial Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 199-210. <https://doi.org/10.54367/Jrak.V11i2>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahiji, T. R. M., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis pengukuran kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan pendekatan *Value for Money* pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6, 335-344.
- Yuliyanto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran kinerja melalui pendekatan “*Value for Money*” pada pelaksanaan anggaran Dinas “X” di sektor publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233-245. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>